

Status Maloy Batuta Terancam Dicabut



Sumber gambar :Kompas Senin,05/2/2024

Sejak berdiri tahun 2019, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta di Kalimantan Timur hanya mendapatkan investasi Rp100 miliar. Jika tidak berkembang, status KEK terancam dicabut oleh pemerintah pusat pada Juni 2024.

BALIKPAPAN, Kompas – Sejak diresmikan pada 2019, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kalimantan Timur belum beroperasi dan menggaet investor sesuai target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha menyelesaikan persoalan sampai Juni 2024. Jika tidak, status KEK akan dicabut pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan Timur pada 1 Februari 2024. Ia juga berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK.

“Saya minta laporan detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).

Frasa “berjuang di Jakarta” yang Akmal maksud adalah ia akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah di KEK MBTK. Berdasarkan catatan yang ia terima, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, KEK MBTK belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Hingga 2023, kata Akmal, investasi yang masuk ke kawasan ekonomi khusus ini baru Rp100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya sudah mencapai triliunan rupiah.

Dari diskusi dengan sejumlah pemangku di KEK MBTK, kata Akmal, ada sejumlah kendala yang membuat KEK di Kaltim ini stagnan. Beberapa di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor.

Dengan perkembangan yang lambat itu, pemerintah pusat berencana mencabut kawasan ekonomi khusus untuk Maloy jika Pemprov Kaltim tak mampu membenahi persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan. “Batas akhir keputusan Pemerintah Pusat itu Juni tahun ini,” kata Akmal.

Akmal merinci, salah satu yang jadi pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan jadi dua hal krusial. Keduanya belum sepenuhnya siap dan tersedia.

KEK MBTK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Kawasan ekonomi khusus ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi Rp34,4 triliun dan menyerap 55.700 tenaga kerja sampai tahun 2025.

Hilirisasi

KEK MBTK yang memiliki lahan seluas 509 hektar dibentuk untuk jadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan komoditas lain. Selain itu, kawasan ini juga ditargetkan menjadi pusat bagi industri, gas, batubara, dan industri turunannya.

Wilayahnya yang terletak di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dinilai memiliki potensi ekonomi. Sebab, KEK MBTK berada di jalur strategis sebagai alur perdagangan dalam negeri dan internasional.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan secara khusus ada enam kluster dalam rencana pengembangan ekonomi di IKN dan sekitarnya. Salah satunya adalah KEK MBTK di Kutai Timur. Enam kluster itu diproyeksikan menjadi pusat industri dan hilirisasi di sekitar IKN.

Untuk itu, Akmal berharap KEK MBTK bisa tetap berjalan. Sebab, kawasan ini amat potensi untuk industri di Kaltim. Hal ini juga dinilai bisa mengungkit ekonomi di kawasan sekitar Kaltim.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, ia akan berupaya melanjutkan KEK MBTK. Sebab, kawasan industri ini bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang ada di Kaltim, seperti pisang, nanas, cokelat, sawit, dan batubara. “Kami terus berjuang,” kata Ardiansyah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, KEK MBTK menjadi peluang Kaltim untuk segera beralih ke sektor hilirisasi dalam ekonomi. Selama ini, struktur perekonomian Kaltim didominasi pertambangan dan penggalian yang berkontribusi lebih dari 50 persen.

Hasil penggalian dan pertambangan itu dijual langsung dalam bentuk mentah tidak diolah terlebih dahulu baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Adapun industri

pengolahan di Kaltim hanya berkontribusi sekitar 15 persen dalam struktur perekonomian.

Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim bergantung pada perdagangan global. Sebab, hasil pertambangan batubara, misalnya, diekspor ke sejumlah negara. Saat harga komoditas itu merosot di tingkat dunia, pertumbuhan ekonomi Kaltim pun turut merosot.

Dengan hilirisasi, diharapkan kondisi itu berubah. Sebab, bahan mentah bisa dijual ke perusahaan yang mengolah bahan mentah di dalam negeri. Dengan demikian, akan ada banyak pilihan produk jadi atau produk turunan sumber daya alam yang bisa dijual untuk menyokong perekonomian.

“Periode 2024-2026, Kaltim berkomitmen membangun transformasi ekonomi dengan melakukan investasi pada kegiatan dalam bentuk hilirisasi industri pengelolaan. Selain itu, mendorong UMKM untuk mengelola hasil pertanian menjadi bahan baku agar punya nilai lebih,” kata Sri (Kompas, 12/5/2023). (CIP)

Sumber berita:

1. Kompas, Status Maloy Batuta Terancam Dicabut, 05/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (PP 85/2014), Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan memiliki luas 557,34 ha (lima ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP 85/2014, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan terdiri atas:
 - a. Zona industri;
 - b. Zona logistik; dan
 - c. Zona pengolahan ekspor.